

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Literatur**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Menurut Heider, F. (1958) pencetus teori atribusi, teori ini menjelaskan proses kognitif dibalik upaya individu dalam menganalisis penyebab serta motif yang mendasari perilaku mereka. Teori atribusi menjelaskan bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal diri, seperti kemampuan, usaha, dan kelelahan, serta faktor eksternal yang mencakup kondisi lingkungan seperti peraturan dan cuaca (Martinko, Mark J., Paul Harvey, and Marie T. Dasborough., 2011). Heider, F. (1958), menegaskan bahwa kekuatan internal dan eksternal secara bersama-sama membentuk pola perilaku seseorang, persepsi tidak langsung terhadap situasi menjadi aspek krusial yang menentukan bagaimana seorang bertindak.

##### **2.1.2 Tax Knowledge**

Menurut UU pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Graha et al (2023), pemahaman perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang dipakai sebagai pegangan dalam melaksanakan aturan perpajakan.

Pemahaman terhadap perpajakan mencerminkan kondisi dimana wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ketentuan umum serta prosedur perpajakan yang berlaku, termasuk berbagai regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kewajiban

pajak. Semakin mendalam wawasan yang dimiliki wajib pajak, semakin baik pula kemampuan mereka dalam mengambil keputusan perilaku yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya, kurangnya pengetahuan tentang aturan dan mekanisme perpajakan bisa menyebabkan ketidakmampuan dalam menentukan sikap atau tindakan yang tepat berkaitan dengan kewajiban perpajakan (Harefa dan Gea, 2019). Diperkuat oleh Younus, sabah et al (2021) Tingkat pengetahuan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerapan sanksi perpajakan, sementara upaya sosialisasi pajak terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

### **2.1.3 Environmental concern**

*Environmental concern* merupakan yang mencerminkan sikap proaktif seorang dalam menjaga kelestarian alam melalui perilaku ramah lingkungan. Sikap ini menggambarkan seberapa besar perhatian individu atau kelompok terhadap kondisi lingkungan serta kesiapan dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan lingkungan yang timbul (Karatu & Mat, 2014). Menurut Sue (2003), kepedulian terhadap lingkungan merupakan sikap umum yang berfokus pada kualitas lingkungan dan melibatkan kesediaan individu dalam melakukan tindakan yang bersifat konstruktif untuk menjaga dan meningkatkan kondisi lingkungan dalam setiap aspek perilaku yang relevan. Kepedulian ini juga meliputi kesadaran akan ancaman yang diakibatkan oleh penggunaan sumber daya alam yang tidak terkontrol dan polusi yang dihasilkan oleh aktivitas manusia (Ng & Law, 2015). Kepedulian terhadap lingkungan memiliki tiga dimensi, yaitu; kepedulian egoistik adalah kepedulian yang didasari oleh perasaan terhadap diri sendiri, di mana seseorang akan peduli terhadap dirinya sendiri yang berada dalam bahaya (saya, kesehatan saya, gaya hidup saya, masa depan saya); kepedulian altruistik adalah kepedulian yang didasari oleh perasaan terhadap orang lain di luar diri kita, dimana seseorang peduli terhadap orang lain yang berada dalam bahaya (semua orang, anak-anak, anak-anak saya,

orang-orang di negara saya); dan kepedulian biosferik adalah kepedulian yang didasari oleh perasaan terhadap makhluk hidup selain manusia, dimana seseorang peduli karena makhluk hidup lain dalam bahaya (kehidupan laut, hewan, burung) (Wesley Schultz, 2001). Selain itu, kepedulian lingkungan (*environmental concern*) sebagai suatu alat prediksi yang memungkinkan atas perilaku pembelian produk ramah lingkungan dan bisa menjadi faktor utama dalam proses pengambilan keputusan konsumen (Angelovska, 2012).

#### 2.1.4 Accountability

Menurut Mardiasmo (2009) Akuntabilitas adalah tanggung jawab untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pencapaian maupun kegagalan suatu organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah direncanakan, melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara rutin.

Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2018:27) Adalah tanggung jawab yang melekat pada pemegang amanah (agen) untuk secara terbuka memberikan laporan, menyampaikan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas serta pelaksanaan tugas yang dipercayakan kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk menuntut penjelasan tersebut. Konsep ini menuntut transparansi dan keterbukaan dalam penyajian informasi, dengan bentuk akuntabilitas publik terbagi kedalam dua jenis utama, yaitu:

1. Pertanggung jawaban vertical (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah. Pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada DPR.
2. Pertanggung jawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada Masyarakat luas.

Menurut A Siregar (2015) Akuntabilitas adalah kewajiban individu atau lembaga untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kinerja serta tindakannya kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja yang menekankan transparansi dalam pelaksanaan dan hasil program. Partisipasi aktif pimpinan dan Masyarakat sebagai pemangku kepentingan penting dalam membangun mekanisme ini terutama dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Sari, Nandita Sekar et al, 2023). Taufik et al (2024) menegaskan bahwa dalam pemerintahan, akuntabilitas melibatkan tanggung jawab untuk secara terbuka menjelaskan kebijakan dan pengelolaan sumber daya publik guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan Masyarakat.

#### 2.1.5 Integrity

Menurut PermenPANRB Nomor 38 Tahun 2017, integritas merupakan keselarasan perilaku yang terus-menerus dengan prinsip, norma, dan kode etik organisasi. Hal ini mencakup sikap jujur dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan atasan, kolega, staf bawahan, serta pihak terkait lainnya. Memiliki integritas berarti membangun lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai etika, sekaligus menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap segala keputusan maupun tindakan yang diambil beserta konsekuensi yang mengikutinya. Lalu mengapa integritas itu penting, sebagaimana disampaikan John Maxwell melalui karyanya *Developing The Leader with You*, 2014, beberapa peran penting dari integritas adalah:

- Membangun kepercayaan.
- Memiliki nilai pengaruh yang tinggi.
- Mempunyai standar yang tinggi.

Wisera (2011:85) mengartikan integritas sebagai sebuah bentuk loyalitas, yaitu keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral universal. Integritas dapat diartikan sebagai kemampuan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral meskipun dihadapkan pada situasi

sulit dan tantangan yang berusaha menggoyahkan nilai-nilai etika dan moral yang diyakini. (Rosmi dan Syamsir, 2020)

### **2.1.6 Competence**

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pada dasarnya, kompetensi berarti kecakapan atau kemampuan yang mencerminkan sejauh mana seseorang mampu menjalankan suatu tugas secara terampil dan efektif. Kompeten sendiri bermakna memiliki kemahiran dan kecakapan dalam bidang tertentu. Dalam konteks sumber daya manusia, kompetensi merujuk pada sekumpulan atribut atau karakteristik individu yang menjadi peran utama keberhasilan mereka dalam menjalankan pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi mencakup keahlian, sikap, dan pengetahuan yang secara kolektif membentuk performa efektif dalam pekerjaan yang dijalankan (Widyatama, Arif et al, 2007).

Kompetensi mencakup sifat kepribadian, kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang, yang secara langsung memengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Aspek-aspek ini dapat diukur dan dievaluasi secara sistematis, sehingga memungkinkan perbaikan dan pengembangan kualitas kinerja individu secara berkelanjutan (Diatmika & Rahayu, 2020). Kompetensi merujuk pada kapasitas seorang pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi ini tercermin melalui kreativitas, inovasi, serta kemampuannya untuk menyelesaikan berbagai tantangan yang terkait dengan pekerjaannya. (Nislandi & Munari, 2023)

### **2.1.7 Public Acceptance**

Penerimaan publik dapat diartikan sebagai kesediaan masyarakat untuk berkomitmen pada peraturan atau kebijakan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah. Ini melibatkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Ketersediaan masyarakat untuk menerima dan mendukung kebijakan publik, yang tercermin dalam sikap positif dan komitmen berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan tersebut (Hariyanto et al, 2023). Menurut Taufik, B et al (2024) kepercayaan publik merupakan pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi sejauh mana masyarakat menaruh keyakinan terhadap pemerintah atau lembaga lainnya, pandangan masyarakat terhadap kredibilitas dan integritas pemerintah berperan besar dalam menentukan tingkat kepercayaan publik. Teori-teori mengenai kepercayaan ini menekankan pentingnya kinerja yang konsisten, keterbukaan dalam proses pemerintahan, serta tanggung jawab pejabat publik terhadap tindakannya. Selain itu, partisipasi aktif warga dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan juga menjadi indikator penting dalam membangun legitimasi negara. Upaya memperkuat kepercayaan publik tidak dapat dilepaskan dari komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip *good governance* secara menyeluruh dan berkelanjutan.

### **2.1.8 Trust In Government**

Menurut Ainil Huda (2011) kepercayaan terhadap pemerintahan mencerminkan hubungan dinamis yang terjalin antara negara dengan warga negaranya. Ketika pemerintah dianggap dapat dipercaya, hal ini akan mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak. Sari, et al. (2022) menegaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak, dimana kinerja nyata yang ditunjukkan pemerintah kepada Masyarakat menjadi faktor utama yang menumbuhkan rasa percaya sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk taat membayar keajibannya.

Trust in government digunakan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini, selaras dengan tujuan penelitian yang ingin menguji apakah kepercayaan terhadap pemerintah mampu memediasi hubungan antara,

akuntabilitas, integritas, dan kompetensi dengan penerimaan publik. Hal ini sejalan dengan temuan Muhammad, I., et al. (2021) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan faktor kunci dalam membangun hubungan antara pemerintah dan Masyarakat terkait isu lingkungan. Selain itu, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak iklim (Harring & Jagers, 2013; Kulin & Sevã, 2021). Oleh karena itu, peneliti memilih *trust in government* sebagai variabel mediasi.

## 2.2 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Bhatia, P., & Gupta, K. (2019), dalam penelitiannya mengusulkan penerapan pajak lingkungan dan pajak hijau untuk mengendalikan polusi dan emisi karbon. Pajak hijau dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan, sehingga mereka cenderung mengurangi penggunaan polutan yang dikenakan pajak. Meskipun pajak hijau dapat mendukung pembangunan ekonomi, di sisi lain, hal ini juga akan menambah beban rumah tangga terkait dengan biaya produk. Tujuan utama dari penerapan pajak hijau seharusnya untuk mengurangi polusi udara, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan atau memperluas sistem pajak. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi penerapan pajak hijau meliputi faktor politik, administratif, peralihan menuju energi terbarukan, serta harga pokok produk.

Hasil penelitian Himawan et al (2021), menunjukkan bahwa individu yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih baik, karena mereka lebih memahami kewajiban dan manfaat dari pembayaran pajak.

Muhammad, I et al (2022) Dalam penelitiannya memaparkan kecuali akuntabilitas, tiga variabel (kepercayaan terhadap pemerintah, integritas dan kompetensi) tidak mempengaruhi penerimaan publik terhadap implementasi pajak karbon. Penerimaan Masyarakat terhadap pajak karbon

dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengelola pendapatan yang terkumpul.

Diperkuat oleh Ryu, Y et al (2018), mengungkapkan potensi kerangka kerja kausal mengenai konstruk kepercayaan publik yang terdiri dari kredibilitas institusi, dua dimensi kepercayaan berbeda, serta dampaknya terhadap evaluasi risiko dan akseptabilitas masyarakat. Kredibilitas institusi secara langsung memperkuat kepercayaan terhadap otoritas pemerintahan dan sistem regulasi, serta memberikan kontribusi tidak langsung dalam membentuk kepercayaan regulasi melalui mekanisme mediasi. Selain itu, kredibilitas secara tidak langsung mereduksi persepsi risiko dan meningkatkan penerimaan teknologi nuklir melalui jalur kausal yang kompleks. Kepercayaan terhadap sistem regulasi memiliki daya prediksi lebih dominan dalam menjelaskan variasi persepsi risiko dan penerimaan publik dibandingkan kepercayaan terhadap pemerintahan. Pengaruh kepercayaan beroperasi melalui mediasi persepsi risiko sebagai variabel perantara. Jika pemerintah dianggap bertanggung jawab, Masyarakat akan mengurangi rasa skeptis terhadap kebijakan baru dan percaya bahwa pendapatan yang terkumpul akan digunakan untuk Pembangunan ekonomi dan sosial negara. Selain itu masyarakat melihat kompetensi pemerintah dan kecukupan peraturan sebagai faktor penting dalam mempercayai pemerintah.

Kumarasiri, J et al (2019) dalam penelitiannya bertujuan menilai efektivitas Pajak Karbon dalam mendorong aksi perubahan iklim di perusahaan-perusahaan besar Australia yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Melalui wawancara mendalam dengan eksekutif dari sembilan perusahaan, penelitian ini menemukan bahwa tekanan regulasi melalui Pajak Karbon dapat memengaruhi praktik pengelolaan emisi internal perusahaan. Temuan ini memberikan kontribusi pada teori akuntansi karbon serta memiliki implikasi praktis dan kebijakan.

### **2.3 Keterkaitan antar Variabel dan Perumusan Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh *Tax Knowledge* Terhadap *Carbon Tax Acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

Tingkat pengetahuan pajak yang lebih tinggi akan berhubungan positif dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh pemahaman yang lebih baik dari masyarakat mengenai kewajiban perpajakan, manfaat yang diperoleh dari pajak, serta konsekuensi hukum dari penghindaran pajak. Dengan meningkatnya literasi pajak, masyarakat akan lebih cenderung untuk mematuhi kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan dan pada akhirnya penerimaan pajak yang lebih tinggi untuk mendukung pembangunan ekonomi negara.

Berdasarkan teori atribusi, perilaku wajib pajak dalam melaporkan pajak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di luar kendali pribadi mereka, seperti informasi perpajakan dan kondisi sosial, sehingga pemahaman dan penerapan pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari sumber eksternal ini turut membentuk cara wajib pajak mengambil keputusan dalam pelaporan pajak (Salmah, 2018).

Menurut Alviani, V et al (2023), Tingkat pemahaman tentang perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap keinginan individu untuk membayar pajak, semakin mendalam pengetahuan perpajakan seseorang, semakin besar pula motivasinya untuk melaksanakan kewajiban pajak.

**H1: *Tax knowledge* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi z di Indonesia.**

### **2.3.2 Pengaruh *Environmental Concern* Terhadap *Carbon Tax Acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

Kesadaran lingkungan yang tinggi dapat meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan yang ramah lingkungan. Masyarakat yang peduli terhadap isu lingkungan cenderung mendukung inisiatif pemerintah dalam perlindungan lingkungan.

Teori atribusi memiliki hubungan dengan kesadaran lingkungan yang terletak pada interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam

mempengaruhi perilaku. Kesadaran lingkungan yang tinggi (faktor internal) membuat individu lebih cenderung mendukung kebijakan ramah lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah (faktor eksternal). Menurut teori atribusi Heider, F. (1958), perilaku seseorang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, sehingga individu dengan kesadaran lingkungan yang kuat akan lebih menerima kebijakan tersebut karena mereka merasa kebijakan itu sesuai dengan nilai dan kepedulian pribadi mereka.

Kallbekken, S (2011) menyatakan dalam penelitiannya, dukungan paling baik diprediksi oleh keyakinan tentang konsekuensi lingkungan, diikuti oleh keyakinan tentang konsekuensi terhadap orang lain. Jika tujuannya adalah untuk meningkatkan dukungan pemilih terhadap pajak bahan bakar, maka penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan meyakini bahwa pajak karbon akan memberikan konsekuensi positif terhadap lingkungan.

**H2: *Environmental Concern* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

### **2.3.3 Hubungan *Accountability* Terhadap *Carbon Tax Acceptance* Pada Generasi Z di Indonesia**

Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat transparansi dan tanggung jawab, mereka lebih cenderung menerima kebijakan tersebut. Melalui teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider, F. (1958), Akuntabilitas sebagai faktor eksternal, mencakup transparansi dan tanggung jawab dalam tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Ketika masyarakat merasa bahwa tindakan atau kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), mereka cenderung merasakan keyakinan dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap keputusan tersebut. Menurut teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (seperti kepercayaan dan

sikap pribadi) dan eksternal (seperti akuntabilitas dan transparansi). Masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap akuntabilitas (faktor internal) akan lebih mudah menerima kebijakan atau keputusan publik yang didasarkan pada prinsip transparansi dan tanggung jawab (faktor eksternal). Dengan kata lain, akuntabilitas sebagai faktor eksternal memperkuat atau mempengaruhi perilaku penerimaan publik berdasarkan bagaimana individu menilai dan mengatributkan motif serta penyebab dari kebijakan tersebut.

Menurut Taufik, B et al (2024), akuntabilitas memegang peranan krusial dalam membangun kepercayaan publik, ketika pemerintah menunjukkan tanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan tindakannya masyarakat cenderung merasa yakin dan memberikan dukungan lebih besar kepada pemerintah.

**H3: *Accountability* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

#### **2.3.4 Hubungan *Integrity* Terhadap *Carbon Tax Acceptance* Pada Generasi Z di Indonesia**

Integritas yang dimiliki pejabat publik dan lembaga pemerintah berpengaruh besar pada kepercayaan masyarakat. Teori atribusi juga menekankan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kepuasan publik. Jika masyarakat merasa bahwa layanan publik dikelola dengan integritas, mereka akan lebih patuh terhadap aturan dan mendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya, jika ada persepsi bahwa pemerintah tidak berintegritas, hal ini dapat menimbulkan skeptisisme dan penolakan terhadap kebijakan.

Integritas yang tinggi cenderung menciptakan persepsi positif dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan. Integritas yang baik dapat menciptakan kepercayaan dan meningkatkan pelayanan. (Efkelin, R et al, 2023)

**H4: *Integrity* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

### **2.3.5 Hubungan *Competence* Terhadap Carbon Tax Acceptance pada generasi di Indonesia**

Kompetensi dalam pengelolaan kebijakan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu menjalankan kebijakan dengan baik, mereka akan lebih menerima kebijakan tersebut. melalui teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider, F. (1958), yang berfokus pada bagaimana individu menilai penyebab dan motif di balik perilaku seseorang. Dalam konteks kompetensi, masyarakat atau publik cenderung mengaitkan perilaku atau hasil kerja seseorang dengan faktor internal (seperti kemampuan atau usaha individu tersebut) maupun faktor eksternal (seperti kondisi atau lingkungan yang memengaruhi).

Berdasarkan teori atribusi, ketika seseorang menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam suatu bidang, publik akan cenderung melihatnya sebagai hasil dari kekuatan internal individu tersebut, seperti kemampuan, pengetahuan, atau upaya yang telah dilakukan. Sebaliknya, jika seseorang kurang kompeten, publik bisa mengaitkan kegagalan atau kekurangan tersebut dengan faktor eksternal, seperti aturan yang tidak mendukung atau kondisi yang sulit.

Menurut Poortinga, W et al (2003), Kepercayaan hanya bisa ada jika seseorang atau Lembaga kompeten dalam hal yang menjadi kewajiban. Publik mengharapkan pemerintah tidak hanya berkomitmen pada tanggung jawab tetapi juga harus memenuhinya secara kompeten.

**H5: *Competence* berpengaruh *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia**

### **2.3.6 Hubungan *Trust In Government* dengan *Carbon Tax Acceptance* Pada Genrasi Z di Indonesia**

Kepercayaan pada pemerintah merupakan faktor kunci dalam membentuk penerimaan publik terhadap kebijakan. Semakin tinggi kepercayaan, semakin besar kemungkinan publik menerima kebijakan tersebut. Menurut teori atribusi, publik cenderung mengaitkan perilaku pemerintah dengan faktor utama yaitu kekuatan internal yang mencakup atribut personal atau karakteristik pemerintah seperti kemampuan, niat, atau usaha pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan publik. Jika pemerintah dianggap memiliki kemampuan yang baik, usaha yang tinggi, dan niat yang baik, maka publik akan lebih cenderung memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. Sebaliknya, jika pemerintah dianggap kurang kompeten atau tidak berusaha keras untuk memenuhi harapan masyarakat, maka kepercayaan publik akan menurun.

Blind (2007) Hubungan antara kepercayaan dan pemerintah yang baik bersifat melingkar: Sementara kepercayaan terhadap pemerintah dan wakil-wakilnya mendorong tata Kelola pemerintah yang baik, tata Kelola pemerintah yang baik pada gilirannya akan menimbulkan dan memperkuat kepercayaan. Merujuk pada temuan Jundia et al. (2023), kepercayaan publik terhadap pemerintah dipandang sebagai mekanisme strategis yang mampu menekan biaya transaksi dalam berbagai sektor kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun politik. Kepercayaan ini memiliki dampak signifikan terhadap kualitas dan penerimaan produk-produk yang dihasilkan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan publik hingga layanan administratif. Tingkat kepercayaan yang tinggi mencerminkan kesiapan masyarakat untuk mematuhi dan mendukung keputusan serta regulasi pemerintah. Namun demikian, peningkatan kepercayaan tersebut tidak terjadi secara otomatis, ketidakpercayaan masyarakat tetap menjadi potensi risiko yang harus diantisipasi dengan tindakan nyata dan berkelanjutan dari pihak pemerintah.

**H6: Hubungan *trust in government* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia**

### 2.3.7 Hubungan Accountability terhadap Trust In Government

Akuntabilitas yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab, kepercayaan mereka pun akan meningkat. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan mereka kepada publik. Ketika pemerintah menunjukkan akuntabilitas yang tinggi, masyarakat cenderung mengaitkan tindakan tersebut dengan niat baik dan transparansi, yang meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Teori atribusi menyatakan bahwa publik akan mengevaluasi kinerja pemerintah berdasarkan akuntabilitas yang ditunjukkan. Jika masyarakat melihat bahwa pemerintah dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kebijakan serta tindakan mereka secara jelas, mereka akan lebih cenderung untuk memberikan penilaian positif terhadap kinerja tersebut.

Kallbekken, S (2011) menerangkan dalam penelitiannya, bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat jika mereka percaya bahwa pemerintah membelanjakan pengumpulan pendapatan nasional secara tepat. Dalam hal pajak iklim, akuntabilitas pemerintah mempengaruhi kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola pendapatan pajak lingkungan

**H7: Hubungan *accountability* berpengaruh terhadap *trust in government***

### 2.3.8 Hubungan Integrity terhadap Trust In Government

Integritas pejabat pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pejabat publik bertindak jujur dan transparan, mereka akan lebih percaya pada pemerintah.

Dalam teori atribusi, integritas pemerintah dianggap sebagai atribut internal yang mencerminkan karakter dan sikap para pemimpin. Integritas yang tinggi di dalam pemerintahan berkontribusi pada persepsi bahwa

kebijakan yang diambil adalah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika masyarakat merasakan bahwa keputusan pemerintah didasarkan pada prinsip integritas, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Sebaliknya, jika terdapat indikasi korupsi atau ketidakjujuran, masyarakat akan cenderung meragukan niat dan kemampuan pemerintah

Kitt, S (2021) Integritas pemerintah adalah persepsi publik bahwa lembaga tersebut bertindak dengan cara yang menunjukkan kepedulian, perhatian, keadilan, dan kejujuran kepada publik dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka tanpa terlalu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. komponen ini merupakan elemen penting yang menciptakan hubungan kepercayaan antara publik dan pemerintah.

**H8: Hubungan *integrity* pemerintah berpengaruh terhadap *trust in government***

### 2.3.9 Hubungan Competence terhadap Trust In Government

Kompetensi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintah akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat melihat kinerja yang baik, mereka akan lebih percaya kepada pemerintah. Kinerja yang baik dari pemerintah, yang dihasilkan oleh kompetensi yang tinggi, akan menciptakan persepsi positif di mata publik. Masyarakat cenderung mempercayai bahwa pemerintah yang kompeten mampu mengatasi masalah dan memenuhi harapan mereka. Hal ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa individu akan menilai perilaku berdasarkan hasil yang terlihat.

Dalam penelitian Zahra (2011) menyatakan, kompetensi memiliki peranan yang sangat penting, individu yang memiliki kompetensi dianggap layak menjadi pemimpin, dihormati, serta diikuti oleh orang sekitarnya, sehingga hal tersebut menjadi faktor kunci dalam terciptanya kepemimpinan yang efektif dan sukses. Kompetensi juga merupakan variabel utama yang mempengaruhi tingkat kepercayaan.

### **H9: Hubungan *competence* berpengaruh terhadap *trust in government***

#### **2.3.10 *Trust In Government* Memediasi Pengaruh *Accountability* Terhadap *Carbon Tax Acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

Akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan kebijakan dan sumber daya dapat meningkatkan kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat transparansi dan tanggung jawab, mereka lebih cenderung menerima kebijakan tersebut. Melalui teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider, F. (1958), Akuntabilitas sebagai faktor eksternal, mencakup transparansi dan tanggung jawab dalam tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Ketika masyarakat merasa bahwa tindakan atau kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), mereka cenderung merasakan keyakinan dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap keputusan tersebut. Menurut teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal (seperti kepercayaan dan sikap pribadi) dan eksternal (seperti akuntabilitas dan transparansi). Masyarakat yang memiliki sikap positif terhadap akuntabilitas (faktor internal) akan lebih mudah menerima kebijakan atau keputusan publik yang didasarkan pada prinsip transparansi dan tanggung jawab (faktor eksternal). Dengan kata lain, akuntabilitas sebagai faktor eksternal memperkuat atau mempengaruhi perilaku penerimaan publik berdasarkan bagaimana individu menilai dan mengatributkan motif serta penyebab dari kebijakan tersebut.

Menurut Taufik, B et al (2024), akuntabilitas memegang peranan krusial dalam membangun kepercayaan publik, ketika pemerintah menunjukkan tanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan tindakannya masyarakat cenderung merasa yakin dan memberikan dukungan lebih besar kepada pemerintah.

Kallbekken, S (2011), dalam penelitiannya juga menerangkan, bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah akan meningkat jika mereka percaya bahwa pemerintah membelanjakan pengumpulan pendapatan nasional secara tepat. Dalam hal pajak iklim, akuntabilitas pemerintah

mempengaruhi kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola pendapatan pajak lingkungan

**H10: *Accountability* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia melalui *trust in government* sebagai variabel memediasi**

### **2.3.11 *Trust In Government* Memediasi Pengaruh *Integrity* Terhadap *Carbon Tax Acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

Integritas yang dimiliki pejabat publik dan lembaga pemerintah berpengaruh besar pada kepercayaan masyarakat. Teori atribusi juga menekankan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kepuasan publik. Jika masyarakat merasa bahwa layanan publik dikelola dengan integritas, mereka lebih mungkin untuk patuh terhadap aturan dan mendukung kebijakan pemerintah. Sebaliknya, jika ada persepsi bahwa pemerintah tidak berintegritas, hal ini dapat menimbulkan skeptisisme dan penolakan terhadap kebijakan. Integritas yang tinggi cenderung menciptakan persepsi positif dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan. Integritas yang baik dapat menciptakan kepercayaan dan meningkatkan pelayanan. (Efkelin, R et al, 2023)

Kitt, S (2021) Integritas pemerintah adalah persepsi publik bahwa lembaga tersebut bertindak dengan cara yang menunjukkan kepedulian, perhatian, keadilan, dan kejujuran kepada publik dan bertindak demi kepentingan terbaik mereka tanpa terlalu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu. komponen ini merupakan elemen penting yang menciptakan hubungan kepercayaan antara publik dan pemerintah.

**H11: *Integrity* berpengaruh terhadap *carbon tax acceptance* pada generasi Z di Indonesia melalui *trust in government* variabel memediasi**

### **2.3.12 *Trust In Government* Memediasi Pengaruh *Competence* Terhadap *Carbon Tax Acceptance* pada generasi Z di Indonesia.**

Kompetensi dalam pengelolaan kebijakan publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat percaya bahwa pemerintah mampu menjalankan kebijakan dengan baik, mereka akan lebih menerima kebijakan tersebut. melalui teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider, F. (1958), yang berfokus pada bagaimana individu menilai penyebab dan motif di balik perilaku seseorang. Dalam konteks kompetensi, masyarakat atau publik cenderung mengaitkan perilaku atau hasil kerja seseorang dengan faktor internal (seperti kemampuan atau usaha individu tersebut) maupun faktor eksternal (seperti kondisi atau lingkungan yang memengaruhi).

Berdasarkan teori atribusi, ketika seseorang menunjukkan kompetensi yang tinggi dalam suatu bidang, publik akan cenderung melihatnya sebagai hasil dari kekuatan internal individu tersebut, seperti kemampuan, pengetahuan, atau upaya yang telah dilakukan. Sebaliknya, jika seseorang kurang kompeten, publik bisa mengaitkan kegagalan atau kekurangan tersebut dengan faktor eksternal, seperti aturan yang tidak mendukung atau kondisi yang sulit.

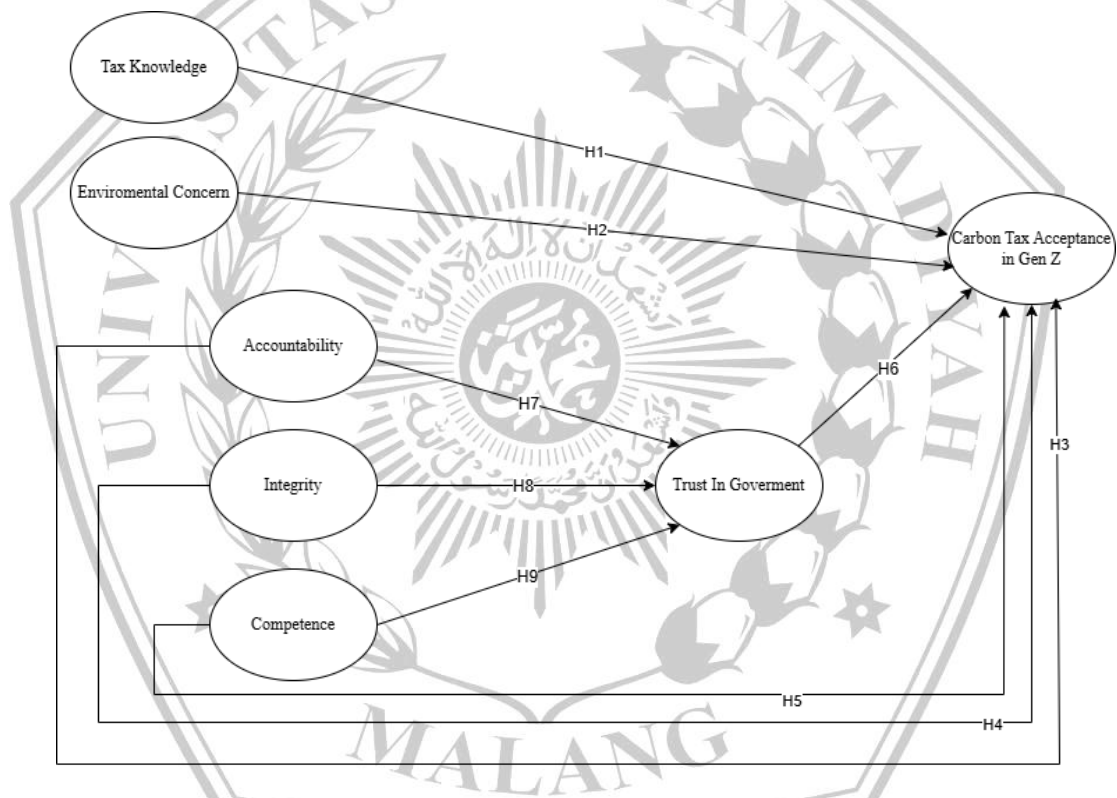
Menurut Poortinga, W et al (2003), Kepercayaan hanya bisa ada jika seseorang atau Lembaga kompeten dalam hal yang menjadi kewajiban. Publik mengharapkan pemerintah tidak hanya berkomitmen pada tanggung jawab tetapi juga harus memenuhinya secara kompeten.

Dalam penelitian Zahra (2011), Menurut penelitian Zahra (2011), kompetensi merupakan elemen kunci yang berkontribusi besar terhadap keberhasilan seorang pemimpin. Seseorang yang menunjukkan kapasitas intelektual, emosional, dan profesional yang tinggi akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari lingkungannya. Dalam hal ini, kompetensi berperan sebagai variabel utama yang menentukan tingkat kepercayaan bawahan terhadap otoritas pimpinan.

**H12: *Competence* berpengaruh terhadap *Carbon Tax Acceptance* pada generasi Z di Indonesia melalui *trust in goverment* variabel memediasi**

## 2.4 Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini peneliti akan berusaha menjelaskan mengenai adanya pengaruh faktor pengetahuan pajak terhadap penerimaan public pada pajak karbon, pengaruh kesadaran lingkungan terhadap penerimaan public pada pajak karbon. Berikut gambar kerangka konseptual dari variabel-variabel Independen yang berpengaruh terhadap variabel Dependen:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir